



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERU WIDODO
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 527372

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 281 m2/281 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.700.000.000
2. Tanah Seluas 664 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.053.000.000

1. MOBIL, MISUBISHI PAJERO SPORT DAKAR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, GWM TANK JEEP Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. MOTOR, KEEWAY BENDA 250 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. MOTOR, ALVA CERVO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 745.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 2.000.000.000

Sub Total Rp. 9.148.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.148.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUNGA HERLINA OKTAVIYANTI**
2. Jabatan : **DIREKTUR KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN MANAJEMEN RISIKO**
3. NHK : **841594**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.900.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
3. Tanah Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	577.266.667
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
2. LAINNYA, DAHON SEPEDA LIPAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. LAINNYA, DAHON SEPEDA LIPAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 8.600.000		
4. MOBIL, HONDA ACCORD Tahun 2024, LAINNYA Rp. 546.666.667		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	186.335.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.238.045.380
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.063.927.662
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.075.993.030
Sub Total	Rp.	9.041.567.739
III. HUTANG	Rp.	3.849.517.227



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.192.050.512

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.